
ANALISIS KESESUAIAN TINDAKAN SLOVAKIA TERHADAP PRODUK PERTANIAN UKRAINA DENGAN KETENTUAN

Keanu Saifany Zuhri¹, Zaskia Bunga Wantoro², Ganesh Lakshita Sekar Haruna³, Zahwa Putri Jannati⁴, Candra Suryavimala Prabhasri⁵, Ilham Bintang Pamungkas⁶

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Muhammadiyah Surakarta

c100230407@student.ums.ac.id¹, c100230409@student.ums.ac.id²,

c100230411@student.ums.ac.id³, c100230413@student.ums.ac.id⁴,

c100230417@student.ums.ac.id⁵, c100230421@student.ums.ac.id⁶

ABSTRACT; *This study analyzes the conformity of Slovakia's import ban on Ukrainian agricultural products with the provisions of the WTO Agreement on Agriculture (AoA), as well as the principles under the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994 and the Agreement on Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS Agreement). This research employs a normative legal method with a statutory and case study approach. The findings indicate that Slovakia's import restriction potentially violates the market access obligation under Article 4 of the AoA, which requires the elimination of non-tariff barriers. Furthermore, the measure may constitute a breach of Article XI of GATT 1994 concerning quantitative restrictions and fails to fully comply with SPS requirements due to insufficient scientific justification, lack of transparency, and proportionality. The policy also raises concerns regarding discriminatory treatment against Ukraine in violation of WTO non-discrimination principles. The study concludes that Slovakia's measures may be characterized as disguised protectionism inconsistent with international trade law and could potentially be subject to dispute settlement proceedings under the WTO framework.*

Keywords: *WTO, Agreement On Agriculture, GATT 1994, SPS Agreement, Import Ban, Slovakia, Ukraine.*

ABSTRAK Penelitian ini menganalisis kesesuaian tindakan Slovakia yang memberlakukan larangan impor terhadap produk pertanian Ukraina dengan ketentuan Agreement on Agriculture (AoA) WTO serta prinsip-prinsip dalam General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994 dan Sanitary and Phytosanitary Measures Agreement (SPS Agreement). Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan impor yang diberlakukan Slovakia berpotensi bertentangan dengan prinsip akses pasar dalam AoA, khususnya Pasal 4 yang mewajibkan

penghapusan hambatan non-tarif. Selain itu, kebijakan tersebut juga mengindikasikan pelanggaran Pasal XI GATT 1994 terkait larangan pembatasan kuantitatif serta tidak sepenuhnya memenuhi standar SPS karena kurangnya bukti ilmiah, transparansi, dan prinsip proporsionalitas. Tindakan Slovakia juga menimbulkan isu diskriminasi terhadap Ukraina yang bertentangan dengan prinsip nondiskriminasi WTO. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan Slovakia berpotensi dikualifikasikan sebagai bentuk proteksionisme terselubung yang tidak konsisten dengan hukum perdagangan internasional dan dapat menjadi objek sengketa dalam mekanisme penyelesaian sengketa WTO.

Kata Kunci: WTO, Agreement On Agriculture, GATT 1994, SPS Agreement, Larangan Impor, Slovakia, Ukraina.

PENDAHULUAN

Pada era perdagangan global, sektor pertanian menduduki posisi sentral dalam sistem ekonomi negara-negara anggota WTO, baik sebagai sumber pangan, lapangan kerja, maupun sebagai komoditas ekspor yang strategis. Perjanjian Perdagangan Pertanian (*Agreement on Agriculture/AoA*) WTO menjadi kerangka hukum utama yang mengatur liberalisasi perdagangan produk pertanian, khususnya dalam hal akses pasar, dukungan domestik, dan subsidi ekspor (Putra, et al., 2024). AoA menekankan prinsip non-diskriminasi, transparansi, dan pembatasan tindakan proteksionis yang dapat memutarbalikkan perdagangan, sehingga negara anggota dituntut untuk menyesuaikan kebijakannya dengan ketentuan tersebut. Ketentuan AoA juga mengharuskan negara anggota untuk menghindari hambatan perdagangan yang tidak transparan, termasuk larangan impor sepihak yang tidak berdasar pada risiko nyata terhadap kesehatan atau keamanan (Sriasih, R. Z. 2022).

Sejak invasi Rusia ke Ukraina pada 2022, sektor pertanian Ukraina mengalami perubahan signifikan, baik di tingkat produksi maupun ekspor, karena Ukraina selama ini berperan sebagai salah satu pemasok biji-bijian dan produk nabati utama dunia. Dengan bergantung pada ekspor pertanian sebagai pilar perekonomian nasional, Ukraina harus mempertahankan akses pasar internasional sekaligus menyesuaikan kebijakannya dengan ketentuan WTO, termasuk AoA, untuk menghindari tindakan proteksionis dari negara-negara tujuan ekspornya. Di tengah krisis perang, banyak negara di Eropa Timur dan kawasan Balkan merasa tertekan oleh tekanan persaingan produk pertanian Ukraina

yang masuk dalam skema bebas bea ke Uni Eropa, sehingga muncul kecenderungan kebijakan pembatasan impor yang bersifat unilateral (Prasetyo et al., 2024).

Konflik kepentingan antara perlindungan petani domestik dan kewajiban hukum WTO menjadi titik kritis yang memicu perdebatan intensif di tingkat internasional, khususnya terkait kepatuhan terhadap *Agreement on Agriculture*. Kondisi ini mendorong Ukraina untuk mengaktifkan mekanisme penyelesaian sengketa WTO sebagai upaya perlindungan hukum terhadap kebijakan impor sepihak yang dianggap merugikan kepentingan ekonominya (Syo, P. F. 2023).

Upaya Ukraina untuk mengajukan komplain ke WTO atas larangan impor produk pertanian oleh beberapa negara anggota Uni Eropa, termasuk Slovakia, merupakan cerminan dari penerapan prinsip *rule-of-law* dalam sistem perdagangan internasional. Pada September 2023, Ukraina mengajukan permintaan konsultasi terhadap Hungaria, Polandia, dan Republik Slovakia atas pemeliharaan larangan impor produk pertanian tertentu, terutama gandum, jagung, rapeseed, dan bunga matahari, yang dianggap tidak konsisten dengan ketentuan GATT 1994 dan *Agreement on Agriculture* WTO.

Tindakan unilateral yang diambil Slovakia meliputi perluasan daftar produk pertanian Ukraina yang dilarang masuk, seperti gandum, jagung, rapeseed, bunga matahari, serta komoditas tambahan seperti madu, gula, malt, dan kedelai, dengan mengacu pada alasan keamanan pangan dan perlindungan petani domestik. Kritik internasional menyoroti bahwa sebagian besar pengumuman tindakan ini tidak dilandaskan pada standar ilmiah yang jelas, transparansi penuh, atau konsultasi yang memadai dengan pihak Ukraina, sehingga mencuatkan kekhawatiran terhadap kepatuhan terhadap prinsip keterbukaan dan non-diskriminasi WTO. Jika tindakan Slovakia tersebut tidak dapat dibenarkan melalui pengecualian keamanan atau kesehatan yang diakui WTO, maka tindakan tersebut berpotensi mengganggu kepercayaan terhadap keberfungsian sistem perjanjian multilateral, khususnya AoA (*Ukraine Ministry of Economy* (2023)).

Tindakan Slovakia terhadap produk pertanian Ukraina membuka ruang analisis hukum terhadap apakah kebijakan tersebut memenuhi atau melanggar prinsip akses pasar yang diatur dalam *Agreement on Agriculture*. AoA mensyaratkan negara anggota untuk mengubah larangan impor menjadi kuota atau tarif yang terbatas, sehingga memastikan bahwa akses pasar untuk produk pertanian tidak dihambat secara total, namun tetap

dijaga keseimbangannya dengan kepentingan kebijakan domestik. Pengenaan larangan impor menyeluruh di Slovakia, bahkan pada beberapa produk yang sebelumnya tidak diketahui menimbulkan risiko kesehatan, mengindikasikan kecenderungan proteksionisme yang berpotensi keluar dari koridor fleksibilitas hukum yang diakui WTO. AoA tidak melarang perizinan tindakan perlindungan sementara, namun menuntut transparansi, keterbatasan durasi, dan justifikasi teknis yang jelas, yang sampai kini tampak belum sepenuhnya terpenuhi dalam narasi kebijakan Slovakia. Dari sudut pandang normatif hukum dagang internasional, tindakan Slovakia menjadi objek penting untuk dinilai konsistensi hukumnya dengan AoA, sekaligus sebagai contoh aktual penerapan prinsip akses pasar dalam konteks konflik geopolitik dan krisis pangan (Hadisaputro, B. 2023).

Ketentuan AoA yang mengatur dukungan domestik dan subsidi ekspor juga relevan untuk menilai reaksi kebijakan Slovakia terhadap produk pertanian Ukraina, karena keterpurukan harga komoditas di pasar domestik menjadi salah satu alasan resmi pelaksanaan larangan impor. AoA membatasi subsidi langsung yang memengaruhi perdagangan, sehingga negara anggota dipaksa untuk mengalihkan dukungan ke area yang tidak memutarbalikkan pasar, misalnya inisiatif pembangunan kapasitas, riset pertanian, atau program *social-safety-net*. Tetapi ketika negara tidak mampu memperkuat daya saing petani domestik melalui kebijakan dukungan domestik yang sesuai AoA, kecenderungan melarang impor produk pertanian dari negara lain muncul sebagai bentuk “proteksi terakhir” yang berisiko bertentangan dengan prinsip-prinsip WTO. Slovakia seolah-olah menempatkan kebijakan larangan impor sebagai kompensasi atas kegagalan kebijakan dukungan domestik jangka panjang, yang secara tidak langsung memperuncing ketegangan antara kepentingan agraria nasional dan kepatuhan terhadap kewajiban internasional. Analisis hukum terhadap tindakan Slovakia menjadi penting untuk menunjukkan apakah kebijakan tersebut merupakan bentuk manipulasi terhadap kebijakan agraria WTO demi melindungi kepentingan politik-ekonomi jangka pendek, ataukah benar-benar respons teknis terhadap tekanan pasar (Sriasih, R. Z. 2022).

Prinsip keamanan dan keamanan pangan yang menjadi alasan kebijakan Slovakia juga perlu dibaca secara kritis melalui kacamata AoA dan *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT). AoA tidak menghapus ruang bagi negara anggota untuk mengambil tindakan perlindungan sementara jika ada risiko nyata terhadap kesehatan manusia,

hewan, atau tumbuhan, namun tindakan tersebut harus berbasis bukti, proporsional, dan tidak berupa “justifikasi” politis yang berkedok kesehatan.

Latar belakang ini melakukan analisis hukum yang mendalam terhadap kesesuaian tindakan Slovakia terhadap produk pertanian Ukraina dengan ketentuan *Agreement on Agriculture* WTO, baik dari sisi akses pasar, pengecualian keamanan, maupun kewajiban nondiskriminasi dan transparansi. Studi kasus ini tidak hanya relevan untuk memahami bagaimana AoA diterapkan secara faktual di tengah krisis geopolitik, tetapi juga penting bagi pengembangan konsep kebijakan agraria yang berkeadilan, serta bagi penguatan kredibilitas sistem penyelesaian sengketa WTO sebagai mekanisme penegakan hukum perdagangan multilateral (Syo, P. F. 2023). Bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, analisis terhadap tindakan Slovakia terhadap produk pertanian Ukraina dapat menjadi referensi berharga dalam merumuskan kebijakan proteksi agraria yang tetap konsisten dengan kewajiban WTO, sekaligus menjaga kepentingan petani domestik.

Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi kajian hukum dagang internasional, khususnya dalam memahami hubungan antara kebijakan agraria nasional, krisis pangan global, dan prinsip-prinsip AoA dalam keanggotaan WTO.

Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kesesuaian tindakan Slovakia terhadap produk pertanian Ukraina, berupa larangan impor, dengan ketentuan *Agreement on Agriculture* WTO terkait prinsip akses pasar, pengurangan hambatan perdagangan, dan batasan tindakan proteksionis sementara?
2. Sejauh mana tindakan Slovakia yang beralasan keamanan pangan dan perlindungan petani domestik memenuhi prinsip nondiskriminasi, transparansi, dan proporsionalitas dalam *Agreement on Agriculture* dan GATT 1994, serta bagaimana implikasi hukumnya bagi sistem perdagangan multilateral dan kebijakan agraria negara anggota WTO?.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus untuk menganalisis kesesuaian tindakan Slovakia terhadap produk pertanian Ukraina dengan ketentuan *Agreement on Agriculture* (AoA)

WTO dan GATT 1994. Data dikumpulkan dari peraturan WTO, dokumen resmi pemerintah Ukraina dan negara anggota Eropa, serta literatur ilmiah terkait AoA dan kebijakan agraria internasional. Analisis dilakukan secara kualitatif deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan norma hukum, menelaah fakta kebijakan, lalu menilai apakah tindakan Slovakia sesuai dengan prinsip akses pasar, nondiskriminasi, transparansi, dan proporsionalitas dalam AoA dan GATT.

Penelitian ini didukung kajian jurnal nasional dan internasional terbaru (5 tahun terakhir) tentang *Agreement on Agriculture*, krisis pangan akibat perang Ukraina, dan kebijakan agraria negara anggota WTO. Bahan hukum sekunder dianalisis untuk menjawab rumusan masalah tentang kesesuaian hukum tindakan Slovakia dan implikasinya terhadap kebijakan agraria multilateral, termasuk relevansinya bagi Indonesia sebagai negara berkembang anggota WTO. Hasilnya disusun secara sistematis dalam bentuk penulisan akademik yang menghubungkan norma, fakta, dan penilaian yuridis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindakan Slovakia dalam melarang impor produk pertanian Ukraina harus terlebih dahulu dianalisis dalam kerangka *Agreement on Agriculture* (AoA) WTO sebagai instrumen utama liberalisasi perdagangan pertanian. AoA yang merupakan bagian dari hasil *Uruguay Round* 1994 bertujuan menciptakan sistem perdagangan pertanian yang adil dan berorientasi pasar melalui pengurangan hambatan perdagangan dan pembatasan kebijakan proteksionis. Ketentuan Pasal 4 AoA secara tegas mengharuskan negara anggota untuk mengganti hambatan non-tarif menjadi tarif (*tariffication*), sehingga larangan impor total secara prinsip tidak diperkenankan dalam sistem WTO. Kebijakan Slovakia yang berbentuk pelarangan impor langsung menunjukkan indikasi kuat penyimpangan dari prinsip akses pasar dalam AoA. (European Parliament, 2023; WTO, *Agreement on Agriculture*).

Tindakan tersebut juga harus diuji berdasarkan Pasal XI:1 GATT 1994 yang melarang pembatasan kuantitatif seperti embargo atau larangan impor. Dalam doktrin hukum perdagangan internasional, larangan impor merupakan bentuk hambatan perdagangan paling restriktif karena menghilangkan akses pasar secara total. Kebijakan Slovakia yang melarang komoditas utama seperti gandum dan jagung dapat dikategorikan

sebagai pelanggaran prima facie terhadap GATT. Negara hanya dapat membenarkan tindakan tersebut jika memenuhi pengecualian yang sangat terbatas dan berbasis justifikasi hukum yang kuat. (WTO, GATT 1994; Afriansyah & Ardiastuti, 2017).

Dalam upaya pembenaran, Slovakia mengemukakan alasan keamanan pangan, sehingga relevan dianalisis melalui *Agreement on Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS Agreement)*. SPS mengatur bahwa negara berhak melindungi kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan, namun tindakan tersebut harus didasarkan pada bukti ilmiah dan analisis risiko. Selain itu, Pasal 2 dan Pasal 5 SPS menegaskan bahwa kebijakan tidak boleh diskriminatif dan tidak boleh menjadi hambatan perdagangan terselubung. Kebijakan Slovakia hanya dapat dibenarkan jika didukung oleh risk assessment yang memadai dan konsisten dengan standar internasional. (WTO, SPS Agreement; Rigod, 2013).

Penerapan SPS sering menimbulkan perdebatan karena potensi penyalahgunaannya sebagai instrumen proteksionisme. Standar ilmiah dalam SPS sering menjadi titik sengketa karena interpretasi risiko yang berbeda antar negara. Dalam kajian Gruszczynski & Scott (2023), ditegaskan bahwa SPS tetap mensyaratkan hubungan rasional antara kebijakan dan bukti ilmiah, serta melarang tindakan yang hanya didasarkan pada kekhawatiran spekulatif. Jika Slovakia hanya mendasarkan kebijakan pada kasus terbatas tanpa analisis sistematis, maka kebijakan tersebut berpotensi dikualifikasikan sebagai *disguised restriction on trade*.

Dalam perspektif hukum WTO, penggunaan alasan keamanan pangan oleh Slovakia dapat dianalisis sebagai bentuk *potential abuse of SPS exception*, yaitu ketika instrumen perlindungan kesehatan digunakan bukan semata-mata untuk tujuan sanitasi, tetapi sebagai alat pembatasan perdagangan terselubung. Dalam praktik sengketa WTO, panel cenderung menilai secara ketat apakah terdapat *rational and scientific nexus* antara tindakan pembatasan dengan risiko nyata terhadap kesehatan. Jika kebijakan hanya didasarkan pada insiden sporadis tanpa evaluasi risiko komprehensif, maka tindakan tersebut tidak memenuhi standar SPS dan dapat dikualifikasikan sebagai *disguised restriction on international trade*, yang secara substansi bertentangan dengan prinsip liberalisasi perdagangan dalam AoA maupun GATT (Mabunda et al., 2025).

Kebijakan Slovakia harus diuji melalui prinsip nondiskriminasi dalam WTO, yaitu *Most-Favoured-Nation* (Pasal I GATT) dan *National Treatment* (Pasal III GATT). Prinsip

ini mengharuskan perlakuan yang sama terhadap semua negara anggota dalam kondisi yang setara. Jika larangan hanya diberlakukan terhadap Ukraina tanpa perlakuan serupa terhadap negara lain, maka kebijakan tersebut bersifat diskriminatif. Prinsip ini merupakan fondasi utama sistem perdagangan multilateral yang bertujuan mencegah praktik proteksionisme selektif. (WTO Legal Texts; Afriansyah & Ardiastuti, 2017).

Dari sudut pandang dukungan domestik dalam AoA, Slovakia seharusnya memanfaatkan instrumen yang diperbolehkan seperti subsidi dalam kategori Green Box (Annex 2 AoA), yang tidak mendistorsi perdagangan. AoA memberikan fleksibilitas kepada negara untuk melindungi petani domestik tanpa melanggar aturan perdagangan internasional. Namun, penggunaan larangan impor menunjukkan bahwa Slovakia cenderung memilih kebijakan protektif yang tidak sesuai dengan mekanisme yang telah disediakan WTO. Hal ini memperkuat indikasi bahwa kebijakan tersebut merupakan respons politik-ekonomi jangka pendek, bukan kebijakan yang berbasis pada kerangka hukum WTO. (WTO, AoA Annex 2; European Parliament, 2023).

Aspek transparansi dan prosedural juga menjadi elemen penting dalam menilai legalitas kebijakan Slovakia. SPS *Agreement* secara eksplisit mewajibkan negara untuk melakukan notifikasi, konsultasi, dan menyediakan informasi yang jelas kepada negara terdampak. Kegagalan memenuhi kewajiban ini dapat dianggap sebagai pelanggaran prosedural yang signifikan dalam sistem WTO. Dalam praktik sengketa WTO, aspek transparansi sering menjadi faktor penting dalam menentukan apakah suatu kebijakan dapat dibenarkan atau tidak. (WTO SPS Agreement; Rigod, 2013).

Penggunaan alasan keamanan pangan dalam konteks geopolitik seperti konflik Rusia-Ukraina harus dianalisis secara hati-hati. SPS memang memberikan ruang bagi tindakan pencegahan, namun tetap membatasi penggunaannya agar tidak menjadi alat proteksionisme. Studi dalam *Economic Analysis and Policy* (2022) menunjukkan bahwa ketidakjelasan dalam definisi risiko dalam SPS sering memicu sengketa perdagangan karena perbedaan interpretasi antar negara. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan Slovakia harus diuji secara ketat untuk memastikan bahwa tindakan tersebut benar-benar diperlukan dan proporsional. (*Economic Analysis and Policy*, 2022).

Tindakan Slovakia berpotensi melanggar berbagai ketentuan utama WTO, yaitu Pasal 4 AoA (akses pasar), Pasal XI GATT 1994 (larangan pembatasan kuantitatif), serta ketentuan SPS terkait *scientific justification*, nondiskriminasi, dan transparansi. Jika tidak

dapat dibenarkan, maka Ukraina memiliki dasar hukum yang kuat untuk memenangkan sengketa di WTO. Kasus ini menunjukkan adanya ketegangan antara kepentingan domestik dan kewajiban internasional, serta menjadi preseden penting dalam interpretasi hukum perdagangan pertanian global.

KESIMPULAN DAN SARAN

Terkait kesesuaian tindakan Slovakia terhadap ketentuan *Agreement on Agriculture* (AoA), larangan impor produk pertanian Ukraina secara prinsip tidak sejalan dengan kewajiban akses pasar dalam WTO. Pasal 4 AoA mewajibkan penghapusan hambatan non-tarif dan menggantinya dengan tarif, sehingga kebijakan larangan impor menyeluruh merupakan bentuk pembatasan yang melampaui ketentuan yang diperbolehkan. Selain itu, tindakan tersebut juga memenuhi karakteristik pelanggaran Pasal XI:1 GATT 1994 karena termasuk pembatasan kuantitatif yang menghambat perdagangan secara langsung. Dari sudut pandang hukum perdagangan internasional, kebijakan Slovakia cenderung tidak sesuai dengan prinsip pengurangan hambatan perdagangan dan batasan tindakan proteksionis dalam AoA.

Alasan keamanan pangan dan perlindungan petani domestik, tindakan Slovakia belum sepenuhnya memenuhi prinsip nondiskriminasi, transparansi, dan proporsionalitas dalam kerangka WTO. Berdasarkan *SPS Agreement*, setiap pembatasan perdagangan harus didasarkan pada bukti ilmiah yang memadai dan analisis risiko yang jelas. Jika kebijakan tersebut hanya didasarkan pada kasus terbatas tanpa justifikasi ilmiah yang komprehensif, maka dapat dikategorikan sebagai *disguised restriction on trade*. Selain itu, penerapan larangan yang secara khusus menyasar Ukraina berpotensi melanggar prinsip *Most-Favoured-Nation* dan *National Treatment* dalam GATT 1994. Kurangnya transparansi dan notifikasi juga memperkuat indikasi bahwa kebijakan tersebut tidak sepenuhnya memenuhi kewajiban prosedural WTO.

Implikasi hukum dari tindakan Slovakia adalah terbukanya peluang sengketa dalam mekanisme penyelesaian sengketa WTO, di mana Ukraina memiliki dasar hukum yang cukup kuat untuk mengajukan klaim pelanggaran. Kasus ini menunjukkan adanya ketegangan antara kepentingan domestik dan kewajiban internasional dalam sistem perdagangan multilateral. Oleh karena itu, tindakan Slovakia dapat menjadi preseden penting dalam menilai batasan penggunaan kebijakan protektif dalam sektor pertanian,

sekaligus menguji konsistensi penerapan prinsip-prinsip AoA dalam kondisi krisis geopolitik global.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahaman, A. Y., & Kurniasari, N. A. (2023). The impact of the right to food on international trade in the Russia–Ukraine war. *Media Iuris*, 6(3).
- Afriansyah, A., & Ardiastuti, E. (2017). Implementation of sanitary and phytosanitary agreement in Indonesia. *Yustisia Jurnal Hukum*, 6(2), 241–256.
- Agricultural Policy, Agribusiness, and Rent-Seeking Behaviour – Blandford, D., & Josling, T. (2018).
European Law Journal – EU Response to Ukraine Grain Imports.
- Global Trade and Customs Journal – Rigod, B. (2022). *Risk Regulation under SPS Agreement.*
- Gruszczynski, L., & Scott, J. (2023). The WTO sanitary and phytosanitary agreement: A commentary (2nd ed.). *Journal of International Economic Law.*
- International Trade Law – Pauwelyn, J. (2016).
Journal of Common Market Studies – Eastern Europe Farmers and Ukrainian Imports.
- Journal of International Economic Law – Syo, P. F. (2023). *Dispute Settlement in WTO: Ukraine Cases.*
- Journal of World Trade – Gruszczynski, L., & Scott, J. (2023). *The SPS Agreement and Scientific Justification in WTO Law.*
- Journal of World Trade – Mabunda, M., et al. (2025). *Disguised Restrictions in SPS Measures.*
- Mabunda, G. P., Nemukondeni, N., & Selaledi, L. (2025). *Sanitary and phytosanitary (SPS) measures and their implications for international agricultural trade: Challenges and opportunities.* Discover Agriculture.
- Patra, A. K. (2016). Agreement on agriculture dalam World Trade Organization. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 46(1), Article 5.
- Prasetyo, T. A., et al. (2024). Pengaruh perang Rusia–Ukraina terhadap ekonomi internasional. *At-Tawazun: Jurnal Ekonomi Syariah*, 12(1), 23–31.
- Putra, A., et al. (2024). *Agreement on Agriculture dalam kerangka World Trade Organization.* Legality: Jurnal Ilmiah Hukum

- Putra, I. G. N. A., et al. (2024). Legal analysis of WTO Agreement on Agriculture in global trade. *Lex Scientia Law Review*, 8(1).
- Review of International Political Economy – *Geopolitical Tensions and Trade Restrictions*.
- Roza Nova, S. A. (2024). Implikasi Agreement on Agriculture (AoA/WTO) terhadap pengaturan perdagangan produk pertanian Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 4(3).
- Schebesta, H., & Sinopoli, D. (2018). The SPS Agreement and risk regulation. *European Journal of Risk Regulation*, 9(1), 1–15.
- The Law and Policy of the World Trade Organization – Van den Bossche, P., & Zdouc, W. (2021).
- The Regulation of International Trade – Trebilcock, M., Howse, R., & Eliason, A. (2013).
- Wood, B., et al. (2017). The WTO SPS agreement and agri-food trade. *Social Sciences*, 6(2), 51.
- World Trade Organization: Law, Practice, and Policy – Matsushita, M., Schoenbaum, T., & Mavroidis, P. (2015).
- World Trade Organization. (1994). Agreement on Agriculture.
- World Trade Organization. (1994). Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures.
- World Trade Organization. (1994). General Agreement on Tariffs and Trade (GATT 1994).
- World Trade Review – Putra, et al. (2024). *Agricultural Trade Liberalization under AoA*.
- Zhang, Y., et al. (2024). Global food trade disruption and geopolitical conflicts. *Economic Analysis and Policy*, 82, 120–135.